

**ANALISIS SEKTOR BASIS DI KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2008-2010**

Oleh :

Teguh Pamuji Tri NH, SE, MSi*)

Abstraksi

Dalam Penelitian ini ingin mengetahui sector basis yang menjadi penompang di Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis LQ, dan analisis tipologi daerah (Klassen) untuk mengetahui kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan.

Kata Kunci : Sektor Basis, Tehnik Analisis LQ dan Klassen

1. Latar Belakang

Pentingnya peningkatan perekonomian suatu daerah, di dalam meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk. Oleh karena itu suatu daerah perlu mengetahui sektor apa yang menjadi sektor basis di wilayah tersebut. Dengan mengetahui sektor basis, dapat diketahui sektor apa yang menjadi penompang wilayah tersebut. Metode *Location Quotient* (LQ) adalah salah satu tehnik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau non basis (Prasetyo, 2001 : 41-53; Lincolyn, 1997: 290). Analisis LQ dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah.

Dalam penelitian ini wilayah yang akan diteliti sektor basisnya adalah Kabupaten pekalongan.

2. Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah sektor apa saja yang menjadi basis dan non basis di Kabupaten Pekalongan.

3. Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini ingin mengidentifikasi dan menganalisis sektor yang menjadi penopang bagi Kabupaten Pekalongan dan sektor apa yang perlu dikembangkan agar kelak bisa menjadi sektor basis di Kabupaten Pekalongan

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan di dalam pengembangan sektor yang ada di Kabupaten Pekalongan.

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Teori Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Salah satu aspek pembangunan wilayah (regional) adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur. Perubahan struktur ekonomi dapat berupa peralihan dari kegiatan perekonomian ke nonpertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi, serta perubahan status kerja buruh. Karena itu konsep pembangunan wilayah (regional) sangat tepat bila didukung dengan teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, pusat pertumbuhan dan teori spesialisasi. Rahardjo Adisasmita (2005), menyatakan bahwa Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari

sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Terdapat pula beberapa teori penting lainnya mengenai pembangunan ekonomi wilayah (regional) diantaranya menurut aliran Klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk.

5.2. Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002). Telah diketahui bersama bahwa tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil perkapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, maka strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan usaha di daerah tersebut. Oleh karena itu langkah-langkah berikut dapat dijadikan acuan dalam mempersiapkan strategi

pengembangan potensi yang ada didaerah, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan serta mencari faktor-faktor penyebab rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3. Mengidentifikasi sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumberdaya manusianya yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.
4. Dengan model pembobotan terhadap variabel - variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan sub-sektor, maka akan ditemukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
5. Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang diharapkan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable development*).

5.3. Sektor Potensial Dalam Pengembangan Wilayah

Persoalan pokok dalam pembangunan daerah sering terletak pada sumberdaya dan potensi yang dimiliki guna menciptakan peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada kerjasama Pemerintah dan masyarakat untuk

dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang tersedia dalam daerah dan diperlukan sebagai kekuatan untuk pembangunan perekonomian wilayah. Pengembangan wilayah diartikan sebagai semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan pemerataan pembangunan dalam semua sektor dan pada seluruh bagian wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara serentak pada semua tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. Disebutkan juga bahwa investasi diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi dan dapat meningkatkan pendapatan wilayah dalam jangka waktu relatif singkat (Glasson, 1990).

Dari definisi tersebut diatas dimaksudkan bahwa wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar akan berkembang lebih pesat, kemudian pengembangan wilayah tersebut akan merangsang wilayah sekitarnya. Bagi sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor lain yang kurang potensial.

Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektorsektor perekonomian yang potensi berkembangnya cukup besar. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor potensial tersebut.

Perkembangan ekonomi suatu wilayah membangun suatu aktivitas perekonomian yang mampu tumbuh dengan pesat dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor lain sehingga membentuk *forward linkage* dan *backward linkage*. Pertumbuhan yang cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya secara tidak langsung sektor perekonomian lainnya akan mengalami perkembangan.

Jadi disimpulkan bahwa pengembangan suatu sektor ekonomi potensial dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor lain yang terkait, baik sebagai input bagi sektor potensial maupun sebagai imbas dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor potensial yang mengalami peningkatan pendapatan. Hal inilah yang memungkinkan pengembangan sektor potensial dilakukan sebagai langkah awal dalam pengembangan perekonomian wilayah dan pengembangan wilayah secara keseluruhan.

5.4. Teori Basis Ekonomi

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatankegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan kegiatan Basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor

barang jadi; luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal. Implisit didalam pembagian kegiatankegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977).

Kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*Prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Pendekatan secara tidak langsung mengenai pemisahan antara kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat menggunakan salah satu ataupun gabungan dari tiga metode yaitu :

- a. Menggunakan asumsi-asumsi atau metode arbetrer sederhana Mengasumsikan bahwa semua industri primer dan manufakturing adalah Basis, dan semua industri Jasa adalah bukan basis, metode tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam sesuatu kelompok industri bisa terdapat industri-industri yang menghasilkan barang yang sebagian di ekspor atau dijual kepada lokal atau ke duanya.
- b. Metode kedua, yakni kebutuhan minimum (*minimum requirements*) adalah modifikasi dari metode LQ dengan menggunakan distribusi minimum dari employment yang diperlukan untuk menopang industri

regional dan bukannya distribusi rata-rata. Untuk setiap daerah yang pertama dihitung adalah persentase angkatan kerja regional yang dipekerjakan dalam setiap industri. Kemudian persentase itu diperbandingkan dengan perhitungan hal-hal yang bersifat kelainan dan persentase terkecil dipergunakan sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi industri tertentu. Persentase minimum ini dipergunakan sebagai batas dan semua employment di daerah-daerah lain yang lebih tinggi dari persentase dipandang sebagai employment basis. Proses ini dapat diulangi untuk setiap industri di daerah bersangkutan untuk memperoleh employment basis total. Dibandingkan dengan metode LQ, metode ini malahan lebih bersifat arbiter karena sangat tergantung pada pemilihan persentase minimum dan tingkat disagregasidisagregasi yang terlalu terperinci malahan dapat mengakibatkan hampir semua sector menjadi kegiatan basis atau ekspor. Teori basis ini mempunyai kebaikan mudah diterapkan, sederhana dan dapat menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah dan dampak umum dari perubahanperubahan jangka pendek. Keterbatasan teori ini tidak terlalu ketat dan dapat menjadi landasan yang sangat bermanfaat bagi peramalan jangka pendek.

c. Metode LQ

Metode *Location Quotient* (LQ) adalah salah satu tehnik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau non basis (Prasetyo, 2001 : 41-53; Lincolyn, 1997: 290). Analisis LQ dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan

merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah.

$$LQ = (L_{ij}/L_j) / (N_{ip}/N_p)$$

Keterangan:

L_{ij} = Nilai tambah sektor i di daerah j
(Kabupaten/Kota)

L_j = Total nilai tambah sektor di daerah j

N_{ip} = Nilai tambah sektor i di daerah p (Propinsi/
Nasional)

N_p = Total nilai tambah sektor di p

P = Propinsi /Nasional

L_{ij}/L_j = Prosentasi employment regional dalam sektor
 i

N_{ip}/N_p = Prosentase employment nasional dalam sektor
 i

Atau melalui formulasi berikut:

$$LQ = \frac{V_{iR}/V_R}{V_i/V}$$

Dimana :

V_{iR} = Jumlah PDRB suatu sektor kabupaten / kota

V_R = Jumlah PDRB seluruh sektor kabupaten/kota

V_i = Jumlah PDRB suatu sektor tingkat propinsi

V = Jumlah PDRB seluruh sektor tingkat propinsi

Berdasarkan hasil perhitungan LQ tersebut dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut :

- Jika $LQ > 1$, merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi Kabupaten / kota lebih tinggi dari tingkat propinsi

- Jika $LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi kabupaten / kota sama dengan ditingkat propinsi
- Jika $LQ < 1$, adalah merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat Spesialisasi kabupaten/kota lebih rendah dari tingkat propinsi.

6. Hasil Analisis

6.1. Analisis LQ

Dilihat dari nilai LQ-nya, sektor basis di Kabupaten Pekalongan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dari nilai LQ sektor yang menjadi basis Kabupaten Pekalongan adalah sektor yang memiliki nilai LQ yang lebih besar dari 1. Sektor yang dalam waktu 2008-2010 selalu memiliki nilai LQ yang lebih dari 1 dan menjadi sektor basis di Kabupaten Pekalongan adalah sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air minum; sektor bangunan; sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan dan sektor jasa.

**Tabel : Perkembangan Nilai LQ Sektoral
Kabupaten Pekalongan 2008-2010**

Lapangan Usaha	LQ		
	2008	2009	2010
Pertanian	1.11	1.13	1.16
Pertambangan&Penggalian	1.00	0.99	0.91
Industri Pengolahan	0.81	0.80	0.79
Listrik Gas & Air Minum	1.32	1.34	1.33
Bangunan	1.04	1.08	1.06
Perdag, Restoran &	0.90	0.87	0.87

hotel			
Pengangkutan&Komunikasi	0.78	0.75	0.75
Keu, Persewaan&Jasa Perusahaan	1.15	1.14	1.16
Jasa-Jasa	1.61	1.68	1.67

Sumber : Hasil Analisis Penyusun

6.2. Klasifikasi Sektoral

Dari klasifikasi sektoral Pada tabel berikut ini terlihat bahwa untuk tahun 2008-2010, sektor-sektor yang maju dan tumbuh cepat di Kabupaten Pekalongan adalah *sektor jasa*. Sedangkan sektor yang berkembang cepat adalah *sector listrik, gas dan air bersih; bangunan: pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan & jasa perusahaan*. Sementara itu, sektor yang relatif tertinggal (terbelakang) adalah *sektor pertambangan & penggalian* Dan yang terakhir, *sektor pertanian; industri; perdagangan, hotel dan restoran* adalah sektor yang termasuk kategori maju tetapi tertekan.

**Tabel : Ketimpangan Perkembangan Sektoral
Di Kabupaten Pekalongan, 2008-2010**

	kontribusi sektoral > 11,11	kontribusi sektoral < 11,11
r > r agregat	sektor maju dan tumbuh cepat jasa	sektor berkembang cepat listrik, gas & air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa perusahaan
r < r agregat	sektor maju tetapi tertekan pertanian; industri; perdagangan, hotel, dan restoran;	sektor relatif tertinggal pertambangan & penggalian;

Sumber : Analisis Penyusun

6.3. Analisis Tipologi Daerah

Perhatikan tabel-tabel berikut ini. Dimana tabel di bawah ini menjelaskan tentang prestasi suatu daerah, dan klasifikasi suatu daerah. Dimana tabel tersebut dibentuk dengan menggunakan metode *growth-share matrix* (atau tipologi Klassen). Indikator yang digunakan dalam pengklasifikasian tiap daerah ini adalah : tingkat atas dasar konstan 2000, serta tingkat pertumbuhannya.

Dari nilai PDRB Harga Konstan dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 bahwa Kabupaten Pekalongan termasuk daerah relatif tertinggal, bila dibandingkan dengan Kota atau Kabupaten sekitarnya. Dimana daerah sekitar yang masuk pada daerah relatif tertinggal pada tahun 2010 adalah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

Tabel : Perbandingan Ketimpangan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pekalongan Dengan Kab / Kota Tetangga Tahun 2010

	Y Daerah > Y Propinsi	Y Daerah < Y Propinsi
r daerah > r propinsi	Daerah Maju dan Tumbuh Cepat (kendal)	Daerah Berkembang Cepat (Batang, Kota Pekalongan)
r daerah < r propinsi	Daerah Maju tetapi Tertekan (Brebes)	Daerah Relatif Tertinggal (Kab.Pekalongan, Pemalang, Kab.Tegal, Kota Tegal)

Sumber : Analisis Penyusun

4. Kesimpulan Dan Saran

- a) Kabupaten Pekalongan termasuk kategori wilayah (daerah) relative tertinggal di Propinsi Jawa Tengah. Dimana Pendapatan Nasional di Kabupaten Pekalongan masih rendah deibandingkan dengan Pendapatan Nasional Propinsi Jawa Tengah. Selain itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah. Untuk itu Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonominya agar kedepan tidak menjadi kateori daerah relatif tertinggal di Propinsi Jawa Tengah.
- b) Sektor pertanian, Sektor Listrik Gas Dan Air Bersih, Sektor Bangunan, Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa menjadi sektor basis di wilayah Kabupaten Pekalongan. Untuk itu pemerintah perlu menjaga agar sektor ini tetap menjadi penompang bagi Kabupaten Pekalongan, sedangkan sektor non basis tetap perlu diperhatikan agar kedepan bisa memiliki peranan yang sama sebagai penompang perekonomian Kabupaten Pekalongan.
- c) Sektor Jasa merupakan sektor maju dan tumbuh cepat di Kabupaten Pekalongan. Sektor yang berkembang cepat di Kabupaten Pekalongan adalah sektor litrik, gas & air bersih ; sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan. Sektor maju tetapi tertekan di Kabupaten Pekalongan adalah sektor pertanian; sektor

industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dan sektor tertinggal di Kabupaten Pekalongan adalah sektor pertambangan dan penggalan. Untuk itu sektor yang tertinggal di Kabupaten Pekalongan perlu mendapat perhatian agar kedepan sektor ini juga bisa menjadi penompang bagi Kabupaten Pekalongan.

*** Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sultan Fatah Demak**

DAFTAR PUSTAKA

- Armida., S. Alisyahbana (2000). Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah: Makalah disampaikan pada kongres ISEI XIV, 21-23 April, di Makasar.
- Bachrul Elmi (2004). Studi Pembiayaan Pembangunan Perkotaan (urban development finance) Kota Prabumulih, Kajian Ekonomi dan Keuangan., Vol.8, No.1. Maret.
- Bendavid-Val., Avrom (1991). Regional and Local Economic Analysis for Practitioners, Fourth edition, New York: Prager Publisher.
- Binar Rudatin (2003). Analisis Sektor Basis Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Studi Kasus Kabupaten-Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 1996-2001. (Tesis S2, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang., Tidak dipublikasikan).
- Boediono (1985). Teori Pertumbuhan Ekonomi., Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Elia Radianto (2003). Evaluasi Pembangunan Regional Pasca Kerusakan di Maluku. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol. 51 (4) hal. 479-499.
- Fuad Asaddin dan Faried W. Mansoer (2001). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Terapan Model Kebijakan Prioritas Sektoral Untuk Kalimantan Timur.
- Glasson John (1990). Pengenalan Perancangan Wilayah Konsep dan Amalan (alih bahasa Ahris Yaakup). Dewan bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia Kualalumpur.
- Hairul Aswandi dan Mudrajat Kuncoro (2002). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 17. No 1. 2002.
- Lincolyn Arsyad, (1999). Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE - UGM, Yogyakarta.

Mudrajat Kuncoro (2000). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan (1st ed.). UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Mudrajat Kuncoro (2002). Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kalster Industri Indonesia. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Rusli Ghalib (2005). Ekonomi Regional. Pustaka Ramadhan. Bandung.